

SKRIPSI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENERBITAN
SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH ULAYAT KAUM OLEH
PIHAK YANG BUKAN AHLI WARIS ADAT
(Studi Kasus: Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas*



OLEH:

PUTRI AGUSTIA

2210112051

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH ULAYAT KAUM OLEH PIHAK YANG BUKAN AHLI WARIS ADAT (Studi Kasus: Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)

Putri Agustia, 2210112051, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Perdata Murni (PK I), 70 Halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat hukum adat Minangkabau yang keberadaannya diakui dalam sistem hukum nasional. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan berupa diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat, sebagaimana terjadi di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi tersebut menimbulkan sengketa antara ahli waris adat dengan pihak pemegang sertifikat dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum atas tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1). Apa faktor penyebab diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat? dan (2). Bagaimana akibat hukum dari penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat di Nagari Sarilamak?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, literatur dan kasus nyata yang terjadi di tengah masyarakat hukum adat Minangkabau. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait di Nagari Sarilamak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). faktor penyebab timbulnya sengketa antara lain adalah perbedaan klaim kepemilikan atas tanah, lemahnya proses verifikasi terkait tanah ulayat yang dilakukan wali nagari dan kerapatan adat nagari, kesimpulan mediasi yang berbeda dengan saat dilakukannya mediasi dan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah ulayat oleh yang bukan ahli waris adat. (2). Akibat hukum dari penerbitan sertifikat tersebut adalah timbulnya sengketa tanah ulayat sehingga ahli waris yang berhak mengalami kerugian baik materil maupun immateril, cacat administratif pada sertifikat, serta terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan hukum adat dan hukum pertanahan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ulayat kaum oleh pihak yang bukan ahli waris adat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan ahli waris adat yang sah.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Sertifikat Hak Milik, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Adat Minangkabau

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK
MILIK TANAH ULAYAT KAUM OLEH PIHAK YANG BUKAN AHLI
WARIS ADAT (Studi Kasus: Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

Putri Agustia, 2210112051, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program

Kekhususan Perdata Murni (PK I), 70 Halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Customary land is land that is communally controlled by the Minangkabau customary law community whose existence is recognized in the national legal system. However, in practice, problems still occur in the form of the issuance of certificates of ownership rights to customary land by parties who are not customary heirs, as occurred in Nagari Sarilamak, Lima Puluh Kota Regency. This condition gives rise to disputes between customary heirs and the certificate holders and has implications for legal uncertainty over customary land. This study aims to analyze (1). What are the factors causing the issuance of certificates of ownership rights to customary land by parties who are not customary heirs? and (2). What are the legal consequences of the issuance of certificates of ownership rights to customary land by parties who are not customary heirs in Nagari Sarilamak?. This study uses an empirical juridical legal research method, with an approach to legislation, literature and real cases that occurred in the Minangkabau customary law community. Data were obtained through library studies and interviews with related parties in Nagari Sarilamak. The results of the study indicate that (1). Factors causing disputes include differences in land ownership claims, weak verification processes related to customary land carried out by village heads and village customary councils, mediation conclusions that differ from those made during mediation, and the issuance of certificates of ownership rights for customary land by non-customary heirs. (2). The legal consequences of issuing these certificates are the emergence of customary land disputes so that the entitled heirs suffer losses, both material and immaterial, administrative defects in the certificates, and the fulfillment of elements of an unlawful act because they have violated the provisions of customary law and applicable land law. Based on the results of this study, it is concluded that the issuance of certificates of ownership rights for customary land by parties who are not customary heirs is an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code which creates legal uncertainty and is detrimental to legitimate customary heirs.

Keywords: Customary Land, Ownership Certificate, Unlawful Acts, Minangkabau Customary Law